

SUAKA POLITIK OLEH RUSIA KEPADA BASHAR AL-ASSAD DITINJAU BERDASARKAN KONVENSI PENGUNGSI 1951

Oleh

Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri, NIM 2214101037

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan mengenai praktik Suaka Politik ditinjau berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, dengan pemberian perlindungan oleh Rusia kepada Bashar al-Assad sebagai contoh kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis bagaimana definisi pengungsi menurut Konvensi Pengungsi 1951 serta relevansinya dengan pemberian suaka politik oleh Rusia kepada Bashar al-Assad, dan sejauh mana tindakan tersebut memenuhi kriteria sebagai pengungsi yang berhak memperoleh perlindungan internasional. (2) Untuk meneliti bagaimana bentuk tanggung jawab Rusia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dalam menangani kasus Bashar al-Assad serta upaya pemenuhan kewajiban tersebut.

Adapun hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan yaitu (1) Secara konseptual, pengungsi menurut Konvensi Pengungsi 1951 adalah individu yang berada di luar negeri yang punya rasa ketakutan beralasan pada tindakan persekusi, sedangkan suaka politik merupakan perlindungan diskresioner negara. Dalam kasus Bashar al-Assad, meskipun secara normatif ia dapat memenuhi unsur awal sebagai pencari perlindungan akibat perubahan rezim, status tersebut tetap dibatasi oleh potensi penerapan klausul pengecualian Pasal 1F atas dugaan kejahatan berat. (2) Oleh karena itu, pemberian suaka oleh Rusia sebagai wujud kedaulatan negara tetap menimbulkan tanggung jawab hukum internasional untuk melaksanakan Konvensi Pengungsi 1951 secara itikad baik, termasuk menjunjung prinsip non-refoulement, melakukan penilaian objektif melalui mekanisme seperti RSD, serta memastikan bahwa keputusan pemberian suaka tidak semata didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan selaras dengan standar hukum internasional yang berlaku.

Kata kunci: Konvensi Pengungsi 1951, Suaka Politik, Pasal 1F, Non-Refoulement, Tanggung Jawab Negara.

***RUSSIA'S POLITICAL ASYLUM FOR BASHAR AL-ASSAD REVIEWED
BASED ON THE CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF
REFUGEES 1951***

By

Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri, NIM 2214101037

Law Study Program

ABSTRACT

This study examines the practice of political asylum as defined by the 1951 Refugee Convention, using Russia's provision of protection to Bashar al-Assad as a case study. The objectives of this study are to (1) analyze the definition of a refugee under the 1951 Refugee Convention and its relevance to Russia's granting of political asylum to Bashar al-Assad, and to what extent such actions meet the criteria for a refugee entitled to international protection. (2) To examine the nature of Russia's responsibilities under the 1951 Refugee Convention in handling the case of Bashar al-Assad and the efforts to fulfill these obligations.

The findings of the research conducted are as follows: (1) Conceptually, an refugee under the 1951 Refugee Convention is an individual outside their country of origin who has a well-founded fear of persecution, whereas political asylum is a discretionary form of state protection. In the case of Bashar al-Assad, although normatively he may meet the initial criteria as a seeker of protection due to regime change, this status remains limited by the potential application of the exclusion clause under Article 1F regarding allegations of serious crimes. (2) Therefore, the granting of asylum by Russia as an exercise of state sovereignty still entails international legal responsibility to implement the 1951 Refugee Convention in good faith, including upholding the principle of non-refoulement, conducting objective assessments through mechanisms such as RSD, and ensuring that decisions to grant asylum are not based solely on political considerations but are in accordance with applicable international legal standard.

Keyword: *The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees, Political Asylum, Article 1F, Non-Refoulement, State Responsibility.*